
**AGENSI PEREMPUAN DIFABEL BERDAYA DALAM MENGHADAPI
DISKRIMINASI GANDA DI RUANG PUBLIK****Wardatullah Sultan¹, Siti Luthfiah², Ulil Albab³, Syamraeni⁴, Mudfainna⁵****Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta**e-mail: ¹warda.tullah03@gmail.com, ²stluthfiahpia@gmail.com, ³ulila9593@gmail.com,
⁴syamraenishamra1493@gmail.com, ⁵mudfainna9657@gmail.com

Abstract: *Women with disabilities continue to experience multiple forms of discrimination in public spaces resulting from the intersection of gender and disability. This condition often positions women with disabilities as vulnerable and socially perceived as lacking agency. However, empirical realities show that some women with disabilities actively exercise agency in responding to such discrimination. This study aims to analyze the forms of multiple discrimination experienced by women with disabilities in public spaces and to examine how their agency is constructed and practiced in facing these challenges. This research employs a qualitative descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with three empowered women with disabilities who are actively engaged in public spaces, supported by limited observation. Data analysis was conducted using thematic analysis based on the Miles and Huberman model. The findings indicate that multiple discrimination manifests in symbolic exclusion, paternalistic treatment, and doubts about women's capacities. Nevertheless, women with disabilities develop agency through family support, education, social and organizational networks, and professional positions. Their agency is expressed through strategies of capacity demonstration, identity negotiation, critical adaptation, and collective agency strengthening. This study emphasizes that women with disabilities should not be viewed as passive subjects but as active social actors capable of navigating and challenging discrimination in public spaces.*

Keywords: *Women With Disabilities, Double Discrimination, Agency, Public Space.*

Abstrak: Perempuan penyandang disabilitas masih menghadapi diskriminasi ganda di ruang publik yang bersumber dari persilangan identitas gender dan disabilitas. Kondisi ini sering kali menempatkan perempuan difabel pada posisi rentan dan dipersepsikan tidak berdaya. Namun, dalam praktik sosial, sebagian perempuan difabel justru menunjukkan kapasitas agensi yang aktif dalam menghadapi berbagai bentuk diskriminasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi ganda yang dialami perempuan difabel di ruang publik serta mengkaji bagaimana agensi perempuan difabel berdaya dibangun dan dijalankan dalam menghadapi diskriminasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga perempuan difabel berdaya yang aktif di ruang publik, serta dilengkapi dengan observasi ringan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi ganda dialami dalam bentuk diskriminasi simbolik, perlakuan paternalistik, dan keraguan terhadap kapasitas perempuan difabel. Meskipun demikian, perempuan difabel membangun agensi melalui dukungan keluarga, pendidikan, jaringan sosial dan organisasi, serta posisi profesional. Agensi tersebut diwujudkan melalui strategi pembuktian kapasitas, negosiasi identitas, adaptasi kritis, dan penguatan agensi kolektif. Penelitian ini menegaskan bahwa perempuan difabel bukan subjek pasif, melainkan aktor sosial yang berdaya dalam menghadapi diskriminasi di ruang publik.

Kata Kunci: Perempuan Difabel, Diskriminasi Ganda, Agensi, Ruang Publik

PENDAHULUAN

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih selalu menjadi realitas sosial yang selalu hadir di berbagai ruang publik, mulai dari dunia pendidikan, dunia politik, dunia kerja, hingga ruang partisipasi sosial. (Barnes & Mercer, 2010). Meskipun wacana inklusivitas semakin menguat melalui kebijakan dan regulasi, praktik sosial memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas kerap mengalami pembatasan akses, baik dalam bentuk hambatan fisik, kelembagaan, maupun kultural.

Dalam ruang partisipasi sosial dan politik, penyandang disabilitas sering kali dihadapkan pada struktur sosial dan kebijakan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan aksesibilitas, sehingga partisipasi mereka menjadi bersifat simbolik dan tidak substantif (Mais & Yaum, 2025). Situasi ini memperlihatkan bahwa diskriminasi tidak hanya bekerja melalui tindakan langsung, tetapi juga melalui mekanisme sosial yang mereduksi kapasitas penyandang disabilitas sebagai subjek sosial yang setara dan otonom. Dalam konteks tersebut, perempuan penyandang disabilitas menempati posisi yang lebih rentan dibandingkan kelompok lainnya karena berada pada persimpangan antara identitas gender dan disabilitas. Selain menghadapi stigma yang melekat pada disabilitas, mereka juga berhadapan dengan konstruksi sosial gender yang secara historis menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah, bergantung, dan kurang berdaya dalam struktur sosial patriarkal (Connell, 2009). Pertautan kedua identitas ini menghasilkan pengalaman ketidakadilan yang bersifat berlapis dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu kategori penindasan semata.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa perempuan difabel lebih sering mengalami pengucilan simbolik, pengabaian suara, serta pembatasan partisipasi di ruang publik dibandingkan laki-laki difabel maupun perempuan non-disabilitas (Garland-Thomson, 2002). Diskriminasi berlapis ini tidak hanya

muncul dalam bentuk perlakuan langsung, tetapi juga melalui praktik sosial sehari-hari yang mereproduksi ketergantungan dan mereduksi agensi perempuan difabel sebagai subjek sosial yang otonom (Meekosha & Shuttleworth, 2009). Dapat dilihat, kerentanan yang dialami perempuan penyandang disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara struktur gender, stigma disabilitas, dan relasi kuasa dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Pengalaman diskriminasi yang dialami perempuan difabel tidak dapat dipahami secara parsial sebagai diskriminasi gender atau disabilitas semata. Sebaliknya, diskriminasi tersebut bekerja melalui persilangan identitas yang saling memperkuat, sehingga menciptakan bentuk ketidakadilan yang khas. Dalam banyak situasi, perempuan difabel dipersepsikan tidak hanya sebagai individu yang terbatas secara fisik atau sensorik, tetapi juga dianggap kurang kompeten secara sosial dan profesional.

Persilangan antara gender dan disabilitas ini dapat dipahami melalui konsep interseksionalitas, yang menekankan bahwa ketidakadilan sosial terbentuk dari pertemuan berbagai identitas sosial dalam struktur kekuasaan yang tidak setara. (Wahyuni, 2018). Pendekatan interseksional memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap pengalaman perempuan difabel dengan melihat bagaimana relasi gender, stigma disabilitas, dan norma sosial bekerja secara simultan dalam membentuk praktik diskriminasi di ruang publik. (Millati, 2016). Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas kerap mengalami subordinasi ganda, di mana ketimpangan gender yang mengakar dalam budaya patriarkal berkelindan dengan konstruksi sosial disabilitas yang menempatkan mereka sebagai kelompok tidak produktif dan bergantung (Rahayu & Dewi, 2020). Kondisi ini menyebabkan perempuan difabel menghadapi hambatan berlapis dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, serta ruang partisipasi sosial, meskipun secara formal negara telah

mengakui prinsip kesetaraan dan inklusivitas (Dahlan, 2021)

Sejumlah penelitian sebelumnya mengenai perempuan difabel umumnya menempatkan mereka dalam posisi sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan bantuan. Fokus kajian sering diarahkan pada keterbatasan, ketergantungan, serta dampak negatif diskriminasi terhadap kehidupan perempuan difabel. Pendekatan semacam ini, meskipun penting, cenderung mereproduksi narasi ketidakberdayaan. Kajian yang secara khusus menempatkan perempuan difabel sebagai subjek yang berdaya dan memiliki agensi masih relatif terbatas. Minimnya penelitian yang mengeksplorasi bagaimana perempuan difabel secara aktif merespons, menegosiasikan, dan menghadapi diskriminasi ganda menyebabkan pengalaman mereka sering direduksi pada narasi korban. Padahal, dalam praktik sosial, banyak perempuan difabel yang terlibat aktif dan berperan signifikan di ruang publik.

Penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan menempatkan perempuan difabel sebagai aktor sosial yang memiliki kapasitas untuk bertindak dan mengambil keputusan. Alih-alih memusatkan perhatian pada kerentanan semata, penelitian ini berupaya membaca pengalaman perempuan difabel dari perspektif agensi, yaitu kemampuan individu untuk merespons struktur sosial yang tidak setara secara aktif dan reflektif. Fokus penelitian diarahkan pada pengalaman empiris perempuan difabel yang aktif di ruang publik, baik dalam ranah organisasi, profesional, maupun institusional. Dengan menelaah pengalaman mereka secara langsung, penelitian ini berupaya memahami bagaimana agensi dibangun, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam konteks diskriminasi ganda yang masih berlangsung. Pendekatan ini menjadi penting karena mampu memperkaya kajian disabilitas dan gender dengan perspektif yang lebih dinamis. Selain itu,

penelitian tentang agensi perempuan difabel juga relevan secara sosial, mengingat masih kuatnya stigma yang menempatkan perempuan difabel sebagai pihak yang pasif dan bergantung, khususnya dalam ruang publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi ganda yang dialami perempuan difabel di ruang publik serta mengkaji bagaimana agensi perempuan difabel berdaya dibangun dan dijalankan dalam menghadapi pengalaman diskriminasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan empiris dalam memahami dinamika perempuan difabel sebagai subjek yang berdaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, karena pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami secara mendalam makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian dalam konteks sosial yang mereka alami. Pendekatan kualitatif relevan digunakan untuk mengkaji pengalaman perempuan difabel berdaya dalam menghadapi diskriminasi ganda di ruang publik, mengingat pengalaman tersebut bersifat subjektif, kontekstual, dan tidak dapat direduksi menjadi angka-angka statistik (Creswell, 2016; Bungin, 2017). Melalui desain deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan realitas sosial yang dihadapi perempuan difabel, tetapi juga menganalisis bagaimana bentuk-bentuk agensi dibangun dan dinegosiasikan dalam relasi sosial yang sarat ketimpangan kuasa.

Subjek penelitian terdiri atas tiga perempuan penyandang disabilitas yang memiliki kapasitas berdaya dan aktif di ruang publik yakni inisial M sebagai dosen penyandang disabilitas daksa, inisial D sebagai Ketua HWDI

penyandang disabilitas daksa, dan inisial R sebagai vokalis penyandang disabilitas netra. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria: perempuan penyandang disabilitas, terlibat aktif dalam aktivitas publik, serta memiliki pengalaman menghadapi diskriminasi berbasis gender dan disabilitas. Variasi latar belakang informan dimaksudkan untuk menangkap keragaman pengalaman dan bentuk agensi yang muncul.

Teknik pengumpulan data melalui mendalam (*in-depth interview*) dengan ketiga informan, karena teknik ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, makna, serta interpretasi subjektif informan secara komprehensif dan reflektif. Setiap sesi wawancara berlangsung kurang lebih selama 2 jam, dan pada beberapa informan dilakukan lebih dari satu kali pertemuan guna memperdalam data serta memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan sekaligus memberi ruang fleksibilitas bagi informan untuk mengembangkan narasi berdasarkan pengalaman personal mereka dalam menghadapi diskriminasi di ruang publik (Sugiyono, 2020). Selain itu, peneliti juga melakukan observasi ringan selama proses wawancara untuk menangkap konteks interaksi, ekspresi nonverbal, dan situasi sosial yang menyertai proses pengumpulan data, sehingga dapat memperkaya dan memperdalam pemahaman terhadap data yang diperoleh.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu kurang lebih dua bulan, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis awal. Rentang waktu tersebut dipilih untuk memastikan proses penggalian data berlangsung secara mendalam, berulang, dan reflektif sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.

Kemudian analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Data hasil wawancara terlebih dahulu ditranskripsikan secara verbatim, kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian guna menyederhanakan dan memfokuskan data mentah. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk memudahkan peneliti melihat pola, hubungan, dan makna, sebelum akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan secara sistematis dan berkelanjutan agar temuan penelitian memiliki kedalaman dan konsistensi analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Diskriminasi Ganda di Ruang Publik

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perempuan difabel yang memiliki kapasitas dan kemandirian tetap berada dalam posisi rentan terhadap praktik diskriminasi ganda di ruang publik. Kerentanan tersebut berakar pada pertautan identitas gender dan disabilitas yang bekerja secara simultan dalam membentuk relasi sosial yang timpang. Meskipun subjek penelitian menunjukkan kemampuan berdaya dan partisipasi aktif, struktur sosial yang sarat bias masih mereproduksi ketidaksetaraan melalui cara pandang yang menempatkan perempuan difabel sebagai pihak subordinat, sehingga pengalaman diskriminatif terus berulang dalam berbagai interaksi sosial. Lebih jauh, diskriminasi yang dialami tidak selalu termanifestasi dalam bentuk penolakan terbuka atau tindakan eksklusif yang eksplisit, melainkan kerap berlangsung secara halus dan simbolik. Praktik ini tercermin dalam penggunaan bahasa yang merendahkan, sikap paternalistik, serta asumsi sosial yang meragukan kapasitas intelektual dan kompetensi perempuan difabel sebagai subjek yang otonom dan setara. Pola

diskriminasi simbolik tersebut menunjukkan bahwa ketidakadilan bekerja melalui mekanisme kultural yang terselubung, namun berdampak signifikan dalam membatasi pengakuan dan posisi sosial perempuan difabel di ruang publik.

Diskriminasi simbolik terhadap perempuan difabel berdaya tampak nyata dalam berbagai pengalaman informan ketika berada di forum publik maupun ruang profesional. Kehadiran mereka sering kali tidak diposisikan sebagai partisipasi substantif, melainkan sekadar pemenuhan aspek administratif atau simbol keterwakilan. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang publik belum sepenuhnya memberikan pengakuan setara terhadap perempuan difabel sebagai aktor sosial yang memiliki kapasitas dan otoritas dalam proses kolektif.

Dalam konteks forum formal, informan menggambarkan bahwa pandangan dan pendapat yang disampaikan kerap diabaikan atau tidak ditindaklanjuti secara serius. Meskipun mereka dilibatkan secara fisik dalam pertemuan atau kegiatan, kontribusi pemikiran yang diajukan sering kali tidak memperoleh ruang yang sama dengan peserta lain. Praktik ini menandakan adanya hierarki implisit yang menempatkan perempuan difabel pada posisi marjinal dalam dinamika diskusi dan pengambilan keputusan. Salah satu informan yakni ketua HWDI penyandang disabilitas daksa inisial D mengatakan *“Menyampaikan ide-ide atau pendapat itu kadang suka ngga direpson, apalagi di pemerintahan ketika ada agenda rapat”* (Informan D, Wawancara, 2026). Ini menegaskan bahwa kehadiran perempuan difabel sering kali dipahami sebatas formalitas, memang betul mereka dilibatkan tetapi tanpa disertai keterlibatan yang bermakna. Keterlibatan tersebut berhenti pada level representasi, bukan pada pengaruh nyata terhadap arah kebijakan atau keputusan yang dihasilkan.

Kondisi ini menguatkan anggapan bahwa pengakuan terhadap perempuan difabel masih bersifat simbolik dan belum menyentuh aspek substantif dari

partisipasi. Lebih jauh, pola ini merefleksikan relasi kuasa yang tidak setara antara kelompok dominan dan perempuan difabel di ruang publik. Relasi tersebut bekerja melalui mekanisme sosial yang halus, seperti pengabaian, delegitimasi pendapat, dan asumsi rendah terhadap kapasitas berpikir dan bertindak. Pengalaman Informan dosen difabel penyandang tuna daksa juga menunjukkan bahwa relasi kuasa bekerja secara halus melalui pengabaian kebutuhan aksesibilitas, seperti penetapan lokasi kegiatan di lantai atas tanpa fasilitas ramah kursi roda meskipun keberadaan dosen difabel telah diketahui sebelumnya. Ketika keberatan disampaikan, aspirasi tersebut tidak segera direspons dan justru dinormalisasi melalui alasan administratif, yang secara implisit mereproduksi asumsi rendah terhadap kapasitas dan kebutuhan perempuan difabel dalam ruang institusional.

Dengan demikian, diskriminasi tidak selalu hadir dalam bentuk eksklusi terbuka, melainkan melalui praktik-praktik sehari-hari yang tampak normal namun sarat bias. Pada akhirnya, pengalaman ini menunjukkan bahwa perempuan difabel memang dihadirkan dalam ruang publik, tetapi belum sepenuhnya diakui sebagai subjek yang setara. Pengakuan yang setengah hati ini memperkuat marginalisasi struktural dan menghambat peluang perempuan difabel untuk berperan secara aktif dan strategis. Oleh karena itu, diskriminasi simbolik menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan ruang publik yang inklusif dan berkeadilan.

Selain diskriminasi simbolik, perlakuan paternalistik juga muncul sebagai pola pengalaman yang berulang dalam kehidupan informan perempuan difabel. Salah satu informan yang merupakan vokalis penyandang disabilitas netra inisial R menggambarkan bahwa dalam berbagai kesempatan profesional, ia kerap menerima perlakuan yang bernada kasihan dan berlebihan. Perlakuan tersebut tidak jarang muncul dalam bentuk bahasa tubuh, intonasi

bicara, maupun sikap protektif yang tidak proporsional, meskipun ia hadir sebagai individu yang memiliki kapasitas dan peran profesional yang jelas. Informan menyampaikan setelah mengingat suatu momen “*Belum lama ini aku naik ojol, drivernya nanya aku bilang mau latihan nge-band sama teman-teman dan kedengarannya dia kaget gitu trus aku bilang aja aku penyanyi loh mas Kamu cek aja sosmedku Kamu cek IG ku, kamu cek Youtube ku Boleh Dia lihat nih Dia nyetir tuh sambil lihat Kata dia Ya maaf ya mbak Saya tadi udah berpikir yang gak Kata dia*” (Informan R, Wawancara, 2026). Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perempuan difabel masih sering dipersepsikan melalui lensa ketidakberdayaan. Alih-alih diposisikan sebagai subjek yang kompeten, mereka justru ditempatkan sebagai objek simpati yang membutuhkan perlakuan khusus. Pola ini menandakan bahwa relasi sosial yang terbangun tidak berangkat dari prinsip kesetaraan, melainkan dari asumsi hierarkis yang merendahkan otonomi perempuan difabel.

Dalam konteks profesional, sikap semacam ini menjadi problematis karena berpotensi mengaburkan pengakuan terhadap keahlian dan prestasi yang dimiliki. Fokus interaksi bergeser dari kapasitas dan kontribusi nyata menuju kondisi disabilitas sebagai identitas utama. Akibatnya, perempuan difabel harus menghadapi tantangan ganda, yaitu membuktikan kompetensi sekaligus menegosiasikan stigma yang dilekatkan melalui sikap penuh belas kasihan tersebut. Lebih jauh lagi, logika paternalistik memperlihatkan bagaimana diskriminasi bekerja secara kultural dan simbolik. Belas kasihan yang tampak positif di permukaan justru menjadi mekanisme penyingkiran yang halus, karena menempatkan perempuan difabel pada posisi inferior. Dalam kerangka ini, empati yang tidak kritis bertransformasi menjadi bentuk kontrol sosial yang membatasi ruang gerak dan pengakuan dengan demikian, pengalaman informan menegaskan bahwa pengakuan terhadap

perempuan difabel belum sepenuhnya didasarkan pada penghormatan atas kompetensi dan profesionalisme. Selama relasi sosial masih dibingkai oleh logika belas kasihan, perempuan difabel akan terus dihadapkan pada praktik paternalistik yang menghambat terwujudnya kesetaraan substantif di ruang publik dan profesional.

Keraguan terhadap kapasitas profesional juga dialami oleh informan yang berprofesi sebagai dosen penyandang disabilitas daksa inisial M, namun tidak selalu muncul secara langsung dari lingkungan institusional. Dalam beberapa situasi, keraguan tersebut justru dimediasi melalui relasi personal terdekat, termasuk kekhawatiran ibu informan yang secara implisit mempertanyakan kemampuan *fisiknya* “*Sebenarnya saya masih sangat ingin lanjut S3 ke luar negeri, tapi sampai sekarang masih maju mundur. Ibu selalu bilang, ‘kamu itu nanti bagaimana di sana, jauh, sendiri, kamu kan beda dengan orang lain.’ Jadi bukan melarang secara langsung, tapi kekhawatirannya itu yang bikin saya ragu.*” (Informan M, Wawancara, 2026)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa terhadap perempuan difabel bekerja secara berlapis dan tidak selalu hadir dalam bentuk diskriminasi yang eksplisit. Kekhawatiran yang dimediasi melalui relasi keluarga, khususnya dari ibu, beroperasi sebagai mekanisme sosial yang halus dengan membingkai pembatasan dalam bahasa perlindungan dan kepedulian. Praktik ini mereproduksi asumsi kerentanan tubuh difabel dan secara implisit meragukan kapasitas perempuan difabel dalam menjalani peran akademik dan profesional secara otonom.

Beberapa pengalaman tersebut menguatkan analisis interseksionalitas, di mana diskriminasi tidak bekerja secara tunggal, melainkan melalui pertemuan gender dan disabilitas yang saling memperkuat. Perempuan difabel mengalami bentuk ketidakadilan yang berbeda dari laki-laki difabel maupun

perempuan non-difabel, sehingga memerlukan pendekatan analitis yang melihat persilangan identitas secara simultan.

Modal Pembentuk Agensi

Meskipun berada dalam situasi yang ditandai oleh diskriminasi ganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan difabel berdaya tidak sepenuhnya berada pada posisi pasif. Mereka memiliki sejumlah modal sosial dan personal yang memungkinkan terbentuknya agensi dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan di ruang publik. Agensi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibangun melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh lingkungan terdekat serta pengalaman hidup yang berkelanjutan. Salah satu modal paling signifikan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah dukungan keluarga. Keluarga berperan sebagai ruang awal yang menyediakan rasa aman, penerimaan, dan legitimasi sosial bagi perempuan difabel. Dalam konteks ini, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit domestik, tetapi juga sebagai agen sosial yang membentuk cara pandang informan terhadap diri mereka sendiri dan dunia di sekitarnya.

Ketiga informan secara konsisten menegaskan bahwa sikap penerimaan dari keluarga menjadi fondasi penting dalam pembentukan kepercayaan diri. Dukungan emosional dan moral yang mereka terima memungkinkan tumbuhnya keyakinan bahwa disabilitas bukanlah penghalang utama untuk berpartisipasi secara aktif di ruang publik. Pengalaman diterima tanpa syarat di lingkungan keluarga menjadi modal psikologis yang krusial dalam menghadapi stigma eksternal. Kemudian, dukungan keluarga juga berkontribusi pada keberanian informan untuk mengambil peran di luar ruang privat. Dorongan untuk menempuh pendidikan, berkarier, dan terlibat dalam aktivitas sosial tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan oleh keluarga terhadap kapasitas mereka. Dengan demikian, keluarga berfungsi sebagai penguat awal

yang mendorong perempuan difabel untuk menegosiasikan batas-batas sosial yang kerap membatasi. Selaras yang disampaikan oleh informan ketua HWDI inisial D menceritakan “*Keluarga saya sangat mendukung. Dari awal mereka tidak pernah membatasi saya hanya karena kondisi disabilitas. Justru mereka selalu bilang, kalau saya mampu dan mau, silakan jalan, jangan ragu. Dan ini yang menguatkan saya sampai detik ini*” (Informan D, Wawancara, 2026).

Begitu pula dengan informan Dosen penyandang disabilitas daksa inisial M mengatakan “*Orang tua saya itu sebenarnya sangat memperjuangkan saya. Dari awal sekolah sampai akhirnya ke Jogja, mereka yang mengusahakan semuanya. Walaupun ibu sering khawatir soal kondisi fisik saya, tapi orang tua tetap memenuhi hak saya sebagai anak untuk sekolah dan berkembang, sampai akhirnya saya bisa jadi dosen*” (Informan M, Wawancara, 2026). Begitupun dengan informan vokalis penyandang disabilitas netra inisial R beliau bercerita “*Keluarga saya sangat mendukung saya bermusik. Dari awal orang tua tidak pernah melarang, justru mereka yang selalu menyemangati dan percaya kalau saya bisa tampil dan berkarya meskipun saya tunanetra*” (Informan R, Wawancara, 2026)

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa pembentukan agensi perempuan difabel berdaya sangat dipengaruhi oleh modal relasional yang bersumber dari keluarga. Penerimaan dan dukungan yang konsisten menciptakan landasan bagi perempuan difabel untuk membangun identitas diri yang positif dan memperluas partisipasi di ruang publik. Dalam konteks ini, keluarga menjadi aktor kunci dalam proses resistensi terhadap diskriminasi dan dalam upaya mewujudkan kemandirian serta pengakuan sosial.

Modal kedua yang berperan penting dalam pembentukan agensi perempuan difabel berdaya adalah pendidikan, yang berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial dalam berbagai

arena kehidupan publik. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme pengakuan sosial yang memberikan otoritas simbolik kepada individu. Dalam konteks perempuan difabel, pendidikan menjadi sarana strategis untuk menantang stigma dan asumsi negatif yang kerap dilekatkan pada identitas disabilitas. Pada informan yang berprofesi sebagai dosen penyandang disabilitas daksa, pendidikan tinggi berperan sebagai modal utama dalam menegosiasikan posisi di lingkungan akademik. Kualifikasi formal dan capaian akademik memberinya dasar legitimasi untuk menuntut pengakuan atas kapasitas profesionalnya. Melalui pendidikan, ia memperoleh otoritas simbolik yang memungkinkan keterlibatan aktif dalam proses akademik, sekaligus menjadi alat untuk menghadapi keraguan terhadap kompetensi yang sering muncul secara struktural.

Pendidikan tinggi dalam hal ini tidak hanya memperkuat posisi individu secara personal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengakses ruang-ruang institusional yang sebelumnya eksklusif. Gelar akademik dan pengalaman keilmuan menjadi penanda kredibilitas yang diakui dalam sistem meritokrasi kampus. Dengan demikian, pendidikan menjadi medium penting bagi perempuan difabel untuk meredefinisi identitas diri dari objek belas kasihan menjadi subjek profesional yang sah. Sementara itu, pada informan yang berprofesi sebagai vokalis penyandang disabilitas netra inisial R, pendidikan tinggi yang ia tempuh pada bidang bimbingan dan konseling memberikan bekal pemahaman diri, penguatan psikologis, serta kemampuan membaca relasi sosial di ruang publik. Pengetahuan tersebut membantunya membangun sikap adaptif dalam menghadapi beragam interaksi sosial. Ia menyampaikan *“Menurut saya jurusan Bimbingan Konseling itu sangat bermanfaat, terutama untuk membentuk kepribadian saya. Saya jadi lebih memahami diri*

sendiri, lebih peka, dan lebih bisa mengelola perasaan.” (Informan R, Wawancara, 2026)

Kemudian informan ketua lembaga HWDI penyandang disabilitas daksa inisial D menerangkan bahwa pendidikan yang sempat ia sandang diperguruan tinggi sangat menunjang cara berfikir dan bertindak, pendidikan berfungsi sebagai modal simbolik yang meningkatkan legitimasi sosialnya, sehingga posisi sebagai perempuan difabel tidak lagi dipandang semata melalui keterbatasan fisik, melainkan melalui kompetensi dan kapasitas profesional yang dimiliki. Ia juga menambahkan bahwa pendidikan yang ia dapatkan diperguruan tinggi menunjang posisinya sebagai ketua organisasi yang dimana ia bisa mengelolah dan menjalankan kerja-kerja organisasi dibawah kepemimpinannya dengan baik. (Informan D, Wawancara, 2026)

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa Pendidikan berfungsi sebagai modal strategis dalam membangun agensi perempuan difabel. Pendidikan memberikan perangkat simbolik dan kultural untuk menegosiasikan posisi sosial, memperluas akses terhadap ruang publik, serta menantang struktur diskriminatif yang ada. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam upaya perempuan difabel berdaya untuk memperoleh pengakuan dan kesetaraan substantif.

Perbedaan modal agensi juga terlihat secara jelas pada aspek jaringan sosial dan keterlibatan organisasi yang dimiliki oleh masing-masing informan. Jaringan sosial berperan sebagai medium penting yang memungkinkan perempuan difabel berdaya memperluas pengaruh, memperoleh akses sumber daya, serta menegosiasikan posisi mereka di ruang publik. Variasi jenis jaringan yang dimiliki menunjukkan bahwa agensi tidak dibangun melalui satu jalur tunggal, melainkan melalui strategi yang kontekstual sesuai dengan bidang dan pengalaman hidup masing-masing

individu.

Pada informan yang menjabat di sebagai Ketua Himpunan lembaga Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) inisial D, keterlibatan aktif dalam organisasi perempuan difabel menjadi sumber utama penguatan agensi. Melalui struktur organisasi, ia memperoleh ruang kolektif untuk melakukan advokasi, menyuarakan kepentingan perempuan difabel, serta terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan. Organisasi berfungsi sebagai wadah politik dan sosial yang mempertemukan pengalaman personal dengan agenda perubahan struktural. Keterlibatannya dalam organisasi tersebut tidak hanya memperluas jejaring, tetapi juga meningkatkan kapasitas tawar informan dalam ruang pengambilan keputusan. Posisi kepemimpinan yang diemban memberikan legitimasi representatif sekaligus akses langsung terhadap aktor-aktor strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks ini, organisasi menjadi modal institusional yang memperkuat peran perempuan difabel sebagai subjek kolektif dalam arena kebijakan publik.

Berbeda dengan itu, informan yang berprofesi sebagai vokalis penyandang disabilitas netra inisial R lebih banyak mengandalkan jaringan profesional di bidang seni. Relasi dengan sesama seniman, komunitas musik, dan institusi budaya menjadi sumber utama pengakuan dan peluang kerja. Jaringan ini memungkinkan agensi dibangun melalui performativitas dan kualitas karya, bukan melalui representasi politik formal. Sementara itu, informan dosen penyandang disabilitas daksa inisial M bertumpu pada jaringan akademik sebagai modal utama. Keterlibatan dalam komunitas keilmuan, relasi dengan kolega, serta partisipasi dalam forum akademik menjadi sarana untuk mempertahankan dan menegosiasikan posisi profesionalnya. Perbedaan pola jaringan ini menegaskan bahwa agensi perempuan difabel berdaya bersifat multidimensional, dibentuk oleh kombinasi modal sosial, institusional, dan

profesional yang beroperasi dalam konteks yang berbeda.

Selain jaringan sosial, posisi profesional juga muncul sebagai modal penting yang membedakan pengalaman dan strategi agensi antar informan. Posisi sebagai pemimpin organisasi, seniman, maupun akademisi memberikan kerangka peran yang memungkinkan perempuan difabel berdaya menempatkan diri sebagai aktor yang memiliki otoritas di ruang publik. Melalui posisi profesional tersebut, mereka memperoleh legitimasi sosial yang memperkuat keberadaan dan suara mereka dalam berbagai arena sosial.

Bagi informan yang berada pada posisi kepemimpinan organisasi yakni informan penyandang disabilitas daksa inisial D, peran profesional membuka akses langsung terhadap ruang pengambilan keputusan dan proses advokasi. Otoritas yang melekat pada jabatan memungkinkan klaim kepemimpinan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga representatif terhadap kepentingan kolektif perempuan difabel. Posisi ini menjadi sarana strategis untuk menantang struktur sosial yang eksklusif, meskipun tetap dihadapkan pada resistensi dan bias gender-disabilitas. Pada informan yang berprofesi sebagai seniman yakni informan penyandang disabilitas Netra inisial R, posisi profesional memungkinkan agensi diekspresikan melalui karya dan performa. Identitas sebagai vokalis memberikan ruang bagi pengakuan berbasis kompetensi artistik, yang secara relatif mampu menggeser fokus dari disabilitas menuju kualitas profesional. Namun demikian, legitimasi ini bersifat situasional dan tidak sepenuhnya meniadakan praktik diskriminatif yang muncul dalam interaksi sosial di luar panggung profesional. Sementara itu, posisi sebagai akademisi memberikan informan dosen penyandang disabilitas daksa inisial M otoritas simbolik dalam lingkungan institusional berbasis pengetahuan. Peran ini memungkinkan partisipasi dalam produksi dan distribusi pengetahuan, sekaligus membuka ruang

untuk menegosiasikan identitas sebagai perempuan difabel yang kompeten. Meski demikian, otoritas akademik tersebut tetap berhadapan dengan bias laten yang mempertanyakan kapasitas tubuh difabel dalam menjalankan peran profesional.

Temuan ini sejalan dengan kerangka pemikiran Amartya Sen yang menempatkan agensi sebagai kemampuan individu untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna membuat pilihan dan tindakan yang bernilai. Dalam konteks perempuan difabel berdaya, posisi profesional berfungsi sebagai salah satu sumber daya penting untuk memperluas ruang tindakan, meskipun agensi tersebut tetap dibatasi oleh struktur sosial yang belum sepenuhnya inklusif. Dengan demikian, agensi dipahami sebagai proses dinamis yang terus dinegosiasikan antara kapasitas individu dan batasan struktural.

Strategi Agensi dalam Menghadapi Diskriminasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan difabel berdaya tidak hanya merespons diskriminasi ganda secara pasif, melainkan secara aktif mengembangkan strategi agensi yang beragam dan kontekstual. Strategi-strategi tersebut dibentuk melalui pengalaman hidup, posisi sosial, serta ruang interaksi yang mereka masuki. Agensi dipraktikkan sebagai upaya sadar untuk menegosiasikan identitas dan menantang relasi kuasa yang timpang di ruang publik.

Strategi pertama yang menonjol adalah pembuktian kapasitas melalui konsistensi kinerja dan pencapaian profesional. Para informan memaknai performa kerja sebagai medium utama untuk meruntuhkan asumsi negatif terkait gender dan disabilitas. Dengan menunjukkan kompetensi secara berkelanjutan, perempuan difabel berdaya berupaya menggeser persepsi sosial dari ketidakmampuan menuju pengakuan atas profesionalisme. Pada informan yang menjabat sebagai Ketua HWDI penyandang disabilitas daksa inisial D, ia

menyampaikan “*Saya selalu percaya bahwa cara paling kuat untuk menjawab keraguan itu lewat kerja. Ketika saya memimpin organisasi, saya tunjukkan bahwa saya bisa mengelola program, melakukan advokasi, dan berhadapan langsung dengan pembuat kebijakan. Dari situ orang akhirnya melihat kemampuan saya, bukan lagi kondisi disabilitas saya*” (Informan D, Wawancara, 2026). Strategi ini dijalankan melalui optimalisasi peran kepemimpinan organisasi. Ia memanfaatkan posisi strukturalnya untuk menunjukkan kemampuan manajerial, kapasitas advokasi, serta kontribusi nyata dalam mendorong perubahan kebijakan. Kepemimpinan tersebut menjadi sarana simbolik sekaligus praktis untuk menegaskan bahwa perempuan difabel memiliki kapabilitas yang setara dalam mengelola organisasi dan memperjuangkan kepentingan publik.

Pembuktian kapasitas tidak hanya berfungsi sebagai respon individual terhadap diskriminasi, tetapi juga sebagai strategi kolektif yang berdampak lebih luas. Ketika perempuan difabel tampil konsisten dalam peran profesional, mereka tidak hanya membangun legitimasi personal, tetapi juga membuka ruang pengakuan bagi kelompok perempuan difabel secara umum. Dalam konteks ini, keberhasilan individu memiliki implikasi sosial yang melampaui pengalaman personal. Dengan demikian, strategi pembuktian kapasitas merefleksikan bentuk agensi yang bersifat performatif dan transformatif. Perempuan difabel berdaya memanfaatkan ruang kerja dan kepemimpinan sebagai arena untuk menegosiasikan makna disabilitas dan gender. Meskipun strategi ini tidak serta-merta menghapus diskriminasi ganda, ia berperan penting dalam memperluas ruang pengakuan dan memperkuat posisi perempuan difabel di ruang publik.

Strategi berikutnya yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah negosiasi identitas, terutama dalam merespons stigma belas kasihan yang

kerap dilekatkan pada perempuan difabel. Strategi ini dijalankan secara sadar sebagai upaya untuk mengendalikan cara diri dipersepsikan dalam interaksi sosial. Negosiasi identitas menjadi penting karena stigma kasihan sering kali mereduksi perempuan difabel dari subjek profesional menjadi objek simpati.

Pada informan yang berprofesi sebagai vokalis penyandang disabilitas netra inisial R, negosiasi identitas diwujudkan melalui pembangunan citra diri sebagai pekerja seni yang profesional. Ia secara konsisten menampilkan kompetensi, kedisiplinan, dan etos kerja dalam setiap ruang pertunjukan maupun interaksi kerja. Dengan demikian, identitas profesional diposisikan sebagai identitas utama yang ingin ditampilkan, sementara disabilitas tidak dijadikan pusat representasi diri. Ia menyampaikan *“Kalau saya bekerja, saya ingin dinilai dari cara saya bernyanyi dan bersikap. Saya berusaha profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi orang fokus ke kerja saya, bukan ke kondisi saya sebagai tunanetra”* (Informan R, Wawancara, 2026)

Negosiasi ini juga dilakukan melalui cara berkomunikasi yang tegas namun adaptif. Informan mengelola bahasa, intonasi, dan respons sosial untuk menghindari posisi yang terlalu diperlakukan secara protektif atau dikasihani. Komunikasi menjadi alat strategis untuk menegaskan otonomi, sekaligus menjaga relasi sosial agar tetap berjalan tanpa mengorbankan martabat profesional. Selain itu, pengelolaan relasi sosial menjadi bagian penting dari strategi negosiasi identitas. Informan secara selektif membangun hubungan kerja yang berbasis kesetaraan dan saling menghargai. Dalam proses ini, ia menetapkan batasan yang jelas terhadap perlakuan yang dianggap merendahkan, sehingga interaksi publik tidak bergeser menjadi relasi yang hierarkis dan paternalistik.

Secara keseluruhan, strategi negosiasi identitas menunjukkan bahwa agensi perempuan difabel berdaya

dijalankan melalui praktik sosial sehari-hari yang reflektif. Dengan mengatur cara diri dipresentasikan dan diperlakukan, perempuan difabel berupaya merebut kembali kontrol atas identitasnya. Strategi ini memungkinkan mereka menantang stigma kasihan secara halus namun efektif, meskipun tetap berlangsung dalam struktur sosial yang belum sepenuhnya setara.

Selain strategi pembuktian kapasitas dan negosiasi identitas, penelitian ini juga menemukan bentuk adaptasi kritis yang dikembangkan oleh informan dosen penyandang disabilitas daksa inisial M dalam lingkungan institusi pendidikan. Adaptasi ini muncul sebagai respons terhadap struktur akademik yang menuntut profesionalisme tinggi namun belum sepenuhnya inklusif. Dalam situasi tersebut, informan memilih untuk menavigasi tuntutan institusional secara strategis tanpa meniadakan identitas disabilitas yang melekat pada dirinya. Ia menyampaikan *“Saya tetap mengajar, tetap meneliti, dan menjalankan pengabdian seperti dosen-dosen yang lain. Saya ingin menunjukkan bahwa meskipun saya memiliki keterbatasan fisik, saya tetap bisa bekerja dan bertanggung jawab secara akademik”* (Informan M, Wawancara, 2026) Adaptasi kritis tersebut terlihat diwujudkan melalui kemampuannya menyesuaikan diri dengan standar kinerja akademik. Informan tetap memenuhi ekspektasi profesional yang berlaku, sekaligus menunjukkan bahwa disabilitas tidak menghalangi produktivitas dan kontribusi intelektual. Penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar sebagai upaya untuk menjaga legitimasi profesional di tengah keraguan yang kerap diarahkan kepadanya.

Namun demikian, penyesuaian ini tidak dapat dipahami sebagai bentuk kepatuhan pasif terhadap norma institusional yang diskriminatif. Sebaliknya, adaptasi yang dilakukan bersifat reflektif dan kritis, dengan mempertahankan posisi tawar dalam struktur akademik. Informan secara

selektif menerima aturan yang memungkinkan perluasan ruang gerak, sembari menolak atau menegosiasikan praktik yang berpotensi merugikan otonomi dan martabatnya. Dengan mempertahankan identitas disabilitasnya secara terbuka, informan juga berkontribusi pada perluasan makna inklusivitas dalam institusi pendidikan. Keberadaannya sebagai dosen difabel menjadi bentuk representasi simbolik yang menantang asumsi normatif tentang tubuh ideal dalam dunia akademik. Adaptasi kritis ini sekaligus berfungsi sebagai strategi resistensi yang bekerja dari dalam struktur, bukan di luar sistem.

Secara keseluruhan, pengalaman informan menegaskan bahwa adaptasi dalam institusi tidak selalu identik dengan penyesuaian tanpa daya. Bagi perempuan difabel berdaya, adaptasi kritis menjadi strategi agensi untuk mempertahankan keberlangsungan profesional sekaligus memperluas pengaruh dalam struktur yang membatasi. Strategi ini memperlihatkan bagaimana agensi dijalankan melalui negosiasi terus-menerus antara tuntutan institusional dan afirmasi identitas diri.

Strategi lain yang menonjol dalam temuan penelitian ini adalah penguatan agensi kolektif melalui praktik solidaritas dan advokasi bersama. Agensi tidak hanya dijalankan pada level individual, tetapi juga dibangun secara kolektif melalui keterlibatan perempuan difabel dalam berbagai bentuk organisasi dan jaringan sosial. Pendekatan kolektif ini memungkinkan respons terhadap diskriminasi bergerak melampaui pengalaman personal menuju upaya perubahan yang lebih struktural. Keterlibatan dalam organisasi perempuan difabel membuka ruang untuk membangun kesadaran bersama atas pengalaman ketidakadilan yang dialami. Melalui forum kolektif, pengalaman individual diartikulasikan sebagai persoalan sosial yang bersifat sistemik, bukan sekadar masalah personal. Proses ini memperkuat solidaritas dan menciptakan basis bersama untuk

merumuskan strategi advokasi yang lebih terarah.

Agensi kolektif juga memungkinkan perempuan difabel mengkonsolidasikan sumber daya, baik simbolik, sosial, maupun politik. Dengan bertindak bersama, mereka memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menghadapi institusi dan aktor yang memproduksi diskriminasi. Advokasi kebijakan, kampanye kesadaran publik, dan dialog dengan pemangku kepentingan menjadi lebih efektif ketika dijalankan melalui kekuatan kolektif dibandingkan upaya individual yang terfragmentasi. Informan dosen penyandang disabilitas daksa mengakui komunitas difabel berfungsi sebagai ruang dukungan sosial dan pertukaran pengalaman, yang membantunya mengelola tekanan institusional serta memperkuat kepercayaan diri dalam menjalankan peran akademik. Komunitas tersebut tidak hanya menyediakan dukungan emosional, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan praktis dan solidaritas yang memperkuat posisi informan sebagai subjek profesional di tengah lingkungan yang kerap meragukan kapasitasnya.

Pengalaman serupa juga dialami oleh informan vokalis penyandang disabilitas Netra inisial R yang menemukan penguatan agensi melalui komunitas musik. Relasi dengan sesama musisi memungkinkan informan berbagi pengalaman, membangun rasa saling percaya, serta memperoleh pengakuan berbasis kompetensi artistik. Dalam ruang kolektif ini, disabilitas tidak menjadi identitas dominan, melainkan salah satu bagian dari keberagaman pengalaman yang dinormalisasi. Komunitas musik berfungsi sebagai arena sosial yang memungkinkan informan menegosiasikan identitas profesionalnya secara lebih setara, sekaligus mengurangi isolasi yang kerap dialami perempuan difabel di ruang publik. Sementara itu, Sementara itu, pada informan yang menjabat sebagai Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), agensi kolektif beroperasi pada level yang lebih terinstitusionalisasi.

Melalui organisasi, informan tidak hanya membangun solidaritas antarsesama perempuan difabel, tetapi juga mengonsolidasikan sumber daya sosial dan politik untuk mendorong advokasi hak dan kesetaraan. Organisasi menjadi ruang berbagi, saling menguatkan, dan bertumbuh bersama, sekaligus wahana untuk mentransformasikan pengalaman personal menjadi agenda perjuangan kolektif. Dengan demikian, agensi kolektif memungkinkan perempuan difabel bergerak melampaui strategi adaptif individual menuju upaya perubahan struktural yang lebih berkelanjutan.

Dalam kerangka teori strukturasi Anthony Giddens, praktik-praktik kolektif tersebut menunjukkan relasi dialektis antara agensi dan struktur. Perempuan difabel tidak hanya dibentuk oleh struktur sosial yang membatasi, tetapi juga secara aktif mereproduksi dan sekaligus mentransformasi struktur tersebut melalui tindakan sehari-hari. Agensi dalam perspektif ini tidak selalu tampil sebagai perlawanan terbuka, melainkan terwujud dalam rutinitas sosial yang secara perlahan menggeser norma dan relasi kuasa. Dengan demikian, strategi solidaritas dan advokasi kolektif memperlihatkan bahwa perubahan sosial dapat berlangsung melalui praktik yang tampak biasa namun berkelanjutan. Perempuan difabel berdaya memanfaatkan ruang organisasi sebagai arena strategis untuk menegosiasikan posisi sosial dan menantang diskriminasi secara struktural. Temuan ini menegaskan bahwa agensi kolektif menjadi elemen kunci dalam upaya membangun ruang publik yang lebih inklusif dan berkeadilan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan difabel berdaya tetap menghadapi diskriminasi ganda di ruang publik yang bersumber dari persilangan identitas gender dan disabilitas.

Diskriminasi tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan langsung, tetapi lebih sering hadir secara simbolik melalui sikap paternalistik, keraguan terhadap kapasitas, serta praktik sosial yang membatasi partisipasi perempuan difabel secara setara.

Meskipun berada dalam struktur sosial yang tidak sepenuhnya inklusif, perempuan difabel dalam penelitian ini menunjukkan kapasitas agensi yang aktif dan kontekstual. Agensi tersebut dibentuk melalui dukungan keluarga, akses pendidikan, jaringan sosial dan organisasi, serta posisi profesional yang memungkinkan mereka menegosiasikan peran dan identitas di ruang publik. Modal-modal tersebut berfungsi sebagai sumber daya penting dalam memperluas ruang gerak dan pengakuan sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi agensi perempuan difabel tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perlawanan terbuka. Sebaliknya, agensi lebih banyak dipraktikkan melalui pembuktian kapasitas, negosiasi identitas, adaptasi kritis terhadap struktur institusional, serta penguatan agensi kolektif. Strategi-strategi ini memungkinkan perempuan difabel untuk bertahan sekaligus membangun posisi tawar dalam relasi sosial yang tidak setara.

Secara teoretik, temuan penelitian ini memperkuat relevansi pendekatan interseksionalitas dalam memahami pengalaman perempuan difabel serta memperluas pemahaman tentang konsep agensi dalam kajian disabilitas dan gender. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan dan praktik inklusif yang tidak hanya berorientasi pada akses fisik, tetapi juga pada pengakuan kapasitas dan partisipasi perempuan difabel sebagai subjek yang berdaya di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

Bahrudin. (2023). Advokasi pekerjaan

- sosial terhadap diskriminasi pada kaum penyandang disabilitas di dunia kerja. *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services*, 3(2), 130–138.
- Barnes, C., & Mercer, G. (2010). *Exploring disability* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- Connell, R. W. (2009). *Gender: In world perspective*. Cambridge: Polity Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, M. (2021). Hak penyandang disabilitas dalam perpektif kesejahteraan sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Garland-Thomson, R. (2002). Integrating disability, transforming feminist theory. *NWSA Journal*, 14(3), 1–32.
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2025). Aksesibilitas dan partisipasi politik penyandang disabilitas. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 2(2).
- Meekosha, H., & Shuttleworth, R. (2009). What's so 'critical' about critical disability studies? *Australian Journal of Human Rights*, 15(1), 47–75.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Millati, S. (2016). Social-relational model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 3(2), 285-306.
- Novitasari, C., & Wahyudi, A. (2019). Diskriminasi penyandang disabilitas di sekolah inklusi. *Paradigma*, 7(2).
- Rahayu, S., & Dewi, R. K. (2020). Perempuan penyandang disabilitas dan ketidakadilan sosial. *Jurnal Perempuan*, 25(1).
- Shakespeare, T. (2014). *Disability rights and wrongs revisited*. London: Routledge.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, Y. P., dkk. (2025). Keterbatasan versus kesempatan: Akses penyandang disabilitas di pasar kerja formal. *ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 5(1).
- Wahyuni, S. (2018). Interseksionalitas dan ketidakadilan gender. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 17(2)